

Pulau Karimunjawa ada 28 pulau. Terdapat 16 wilayah kecamatan, yaitu Kedung, Pecangan, Kalinyamatan, Welahan, mayong, Nalumsari, Batealit, Tahunan, Jepara, Mlonggo, Pakis Aji, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo dan Karimunjawa. Kecamatan yang memiliki luasan terbesar yaitu Kecamatan Keling dengan luas wilayah 126.31 km² (11,61 persen) dan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Kalinyamatan dengan luas wilayah 26.05 km² (2.46 persen).

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jepara

No.	Kecamatan	Luas(ha)	Persentase
1	Kedung	4.306,281	4,29%
2	Pecangan	3.587,806	3,57%
3	Kalinyamatan	2.370,001	2,36%
4	Welahan	2.764,205	2,75%
5	Mayong	6.504,268	6,48%
6	Nalumsari	5.696,538	5,67%
7	Batealit	8.887,865	8,85%
8	Tahunan	3.890,581	3,87%
9	Jepara	2.466,699	2,46%
10	Mlonggo	4.240,236	4,22%
11	PakisAji	6.055,280	6,03%
12	Bangsri	8.535,241	8,50%
13	Kembang	10.812,384	10,77%
14	Keling	12.311,588	12,26%
15	Donorojo	10.864,216	10,82%
16	Karimunjawa	7.120,000	7,09%
Jumlah		100.413,189	100,00%

Sumber: Kabupaten Jepara Dalam Angka, 2020



Sumber: Hasil Analisa Tim PKL Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta (2021)

Gambar 4. 2 Perbandingan Luas Wilayah Antar Kecamatan di Kabupaten Jepara

Tabel 4. 2 Tinggi Wilayah dan Jarak Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Jepara, 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Tinggi Wilayah (Mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Bangsri	12	0-594	16
2	Batealit	11	68-378	12
3	Donorojo	8	0-619	38
4	Kalinyamatan	12	2-29	18
5	Pecangaan	4	2 - 17	15
6	Kedung	18	0-2	9
7	Keling	12	0-1.301	36
8	Kembang	11	0 – 1000	21
9	Mayong	18	13 – 438	23

10	Mlonggo	8	0 – 300	9
11	Nalumsari	15	0 – 1000	28
12	Pakis Aji	8	0 – 1000	8
13	Tahunan	12	0 – 46	7
14	Welahan	15	2 – 7	27
15	Jepara	15	0 – 50	-
16	Karimunjawa	5	0 – 100	90
Kabupaten Jepara		184	0 – 1.301	

Sumber : SK Bupati Jepara No. 146/154 tahun 2019 Tentang Luas Wilayah Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Jepara

Tabel 4. 3 Jumlah Curah Hujan (mm) dan Jumlah Hari Hujan (hari) Menurut Bulan di Kabupaten Jepara, 2020

No	Kecamatan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan (hari)
1	Januari	1.045	25
2	Februari	1.301	27
3	Maret	354	15
4	April	270	21
5	Mei	62	7
6	Juni	29	5
7	Juli	32	4
8	Agustus	88	6
9	September	48	4

10	Oktober	126	11
11	November	129	15
12	Desember	859	24

Sumber : BMKG Semarang, 2020

2. Batas Administasi

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Jepara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa;
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Demak;
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Laut Jawa;
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2010 - 2020 yang dihitung sampai pertengahan tahun 2020 adalah sebanyak 1.184.947 jiwa yang terdiri dari 596.126 jiwa penduduk laki-laki dan 588.821 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Tahunan merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak dengan jumlah 108.962 jiwa. Kepadatan penduduk di 16 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jepara dengan kepadatan sebesar 2906,18 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Karimunjawa sebesar 201,96 jiwa/km².

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Kedung	77.052	1609,61
2	Pecangaan	82.924	2147,18
3	Kalinyamatan	61.087	2344,99
4	Welahan	75.971	2496,58
5	Mayong	90.788	1321,32
6	Nalumsari	74.737	1297,52
7	Batealit	84.741	845,04
8	Tahunan	108.962	2448,03
9	Jepara	81.838	2906,18
10	Mlonggo	83.732	1691,21
11	Pakis Aji	60.144	885,38
12	Bangsri	99.965	1056,38
13	Kembang	70.530	574,91
14	Keling	64.106	507,53
15	Donorojo	58.581	556,22
16	Karimunjava	9.789	201,96
Kabupaten Jepara		1.184.947	22890,04

Sumber: Jepara Dalam Angka, 2020

4. Komiditi Daerah

a. Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Beberapa komoditi yang menjadi unggulan Kabupaten Jepara antara lain tanaman padi dengan sentra produksi di Kecamatan Keling, Bangsri, Mayon, Welahan, dan Kedung. Produksi jagung di Kecamatan Keling, Nalumsari, Kembang, dan Donorejo, kemudian produksi kacang tanah terbanyak di Kecamatan Batealit, Kembang dan Bangsri, sedangkan produksi ubi kayu di Kecamatan Mayong, Keling, Batealit dan Donorojo selanjutnya untuk produksi sayuran semusim antara lain kacang panjang dengan produksi terbanyak di Kecamatan Kembang, terong dengan produksi terbanyak di Kecamatan Welahan, kemudian produksi kangkung paling banyak di Kecamatan Kalinyamatan sedangkan untuk tanaman obat berupa kencur yang terkonsentrasi di Kecamatan

Nalumsari dan Mayong, tanaman jahe dengan luas areal tanam jahe yang paling luas berada di Kecamatan Keling (Desa Klepu, Gelang dan Blingoh), tanaman laos dengan sentra produksi di Kecamatan Keling, Kembang, Blingoh dan Batealit, tanaman kunyit yang produksinya telah menyebar hampir diseluruh Jepara.

Selanjutnya untuk potensi buah-buahan semusim berupa semangka dengan sentra produksi di Kembang dan Bangsri, untuk produksi buah-buahan tahunan berupa durian dengan sentra di Kecamatan Tahunan Batealit dan Mlonggo, jambu air dengan sentra di Kecamatan Tahunan, sentra mangga dengan jenis manalagi dan gadung di Kecamatan Batealit, sentra pisang di Kecamatan Welahan kemudian belimbing dengan sentra produksi tanaman ini terdapat di Kecamatan Welahan dan jenis yang banyak diusahakan adalah jenis kapur dan kunir.

Beberapa arahan pengembangan sektor pertanian yaitu :

- a. Aplikasi sistem pertanian yang modern mulai dari pemilihan benih, pengelolaan lahan, penanaman, perawatan, hingga pada pengelolaan pasca panen, guna mencapai tingkat kualitas dan kuantitas produksi yang tinggi.
- b. Prioritas pengembangan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki alur produksi yang cukup beragam sehingga pertanian tersebut mampu secara langsung memicu kegiatan perekonomian lain.
- c. Optimalisasi peran kelembagaan petani untuk penunjang kegiatan pertanian seperti koperasi, perbankan, dalam membantu petani baik dalam permodalan maupun dalam penjualan hasil pertanian.
- d. Menciptakan saling keterkaitan antara hasil pertanian dengan industri pengolahan hasil pertanian
- e. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.

b. Perkebunan

Produksi unggulan sub sektor perkebunan dengan bidang usaha pengembangan tanaman tebu dengan lokasi pengembangan di Kecamatan Mayong dan Nalumsari, kemudian produksi kapuk randu yang telah mampu menembus pasar ekspor Eropa selain itu kapasitas produksinya memiliki proporsi terbesar di Jawa Tengah hal ini dikarenakan kondisi iklim yang sesuai untuk syarat pembibitan yang berkualitas. Selanjutnya perkebunan kelapa yang sebagian besar produksi dihasilkan dari Kecamatan Keling, Karimunjawa, Mlonggo, dan Bangsri serta perkebunan tanaman kopi yang sebagian besar produksi dihasilkan dari wilayah Kecamatan Keling dan Batealit.

Beberapa arahan pengembangan sektor perkebunan antara lain:

- a. Prioritas pengembangan pada perkebunan bersifat agribisnis dan perkebunan penunjang industri dan perekonomian lainnya.
- b. Prioritas pengembangan perkebunan bagi pertanian lahan kering.

c. Peternakan

Produksi unggulan dari sub sektor peternakan berupa peternakan sapi potong dengan sentra di Kecamatan Keling, Kembang dan Bangsri. Peluang investasi untuk pengembangan populasi sapi masih sangat memungkinkan, hal ini didukung oleh dikarenakan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat, kemudian peternakan kambing dimana penyebaran petani ternak kambing hampir menyeluruh diberbagai wilayah Jepara dengan didominasi di wilayah Kecamatan Keling, Mlonggo, Jepara dan Bangsri, selanjutnya peternakan domba dengan sentra di Kecamatan Bangsri dan Mayong, kemudian peternakan kerbau dengan potensi peternakannya berada di Kecamatan Pecangaan dan Kalinyamatan.

Untuk peternakan dari kelompok unggas yaitu peternakan ayam buras dengan sentra di Kecamatan Keling, Mlonggo, Jepara dan Mayong,

sedangkan untuk ayam ras pedaging tersebar di Kecamatan Mayong, Mlonggo dan Pecangaan, peternakan itik di Kecamatan Pecangaan dan peternakan burung puyuh di Kecamatan Bangsri.

Beberapa arahan pengembangan dari sektor peternakan yaitu:

- 1) Prioritas pengembangan peternakan lahan-lahan yang kurang produktif yang diusahakan bagi penggembalaan hewan ternak.
- 2) Pengembangan dan pemasyarakatan sistem peternakan yang modern, terpadu, praktis sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ternak.
- 3) Pengembangan agribisnis peternakan sebagai wahana pusat pertumbuhan yang berbasis pertanian sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani ternak.

d. Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan bagian dari Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara sejalan dengan dukungan potensi wilayah. Untuk kegiatan dari sektor perikanan berupa perikanan laut, perikanan di perairan umum serta budidaya rumput laut dan artemia (pakan alami berupa udang- udang renik air asin pada kegiatan budidaya ikan/*crustacea*) yang dapat meningkatkan nilai investasi. Budidaya rumput laut berkembang dalam bentuk olahan dengan jenis species yang sudah dibudidayakan : *Euchema Cottoni*, species lain yang potensial untuk dibudidayakan di laut ataupun di tambak adalah *Gracilariaa* sedangkan untuk jenis *Sargassum* tersedia melimpah di perairan umum (pantai) dan belum dimanfaatkan, jenis species ini dapat diolah menjadi tepung dan digunakan sebagai bahan dasar kosmetik yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Selain itu terdapat pula kegiatan dari industri rumah tangga berupa pengasapan ikan (tongkol dan pari) di Kecamatan Pecangaan, pembuatan

ikan asin yang terdapat di hampir tiap TPI serta pengeringan ikan (cumi, teri, jambal roti) di Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara.

- 1) Arahan pengembangan dari sektor perikanan yaitu:
- 2) Pengembangan budidaya perikanan
- 3) Pengembangan kawasan perikanan
- 4) Optimalisasi alat tangkap ramah lingkungan
- 5) Pengembangan pemberdayaan perikanan tangkap
- 6) Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan
- 7) Peningkatan dan pengembangan perbenihan ikan
- 8) Penyelenggaraan revitalisasi perikanan
- 9) Pengelolaan sumberdaya ikan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan
- 10) Penguatan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan.

e. Kehutanan

Kabupaten Jepara memiliki areal hutan dengan luas 38.364,06 Ha yang tersebar di hampir seluruh kecamatan, untuk hutan yang dikelola Perhutani terdapat di Kecamatan Keling, Kembang, Bangsri, Mlinggo, Mayong dan Nalumsari. Sementara hutan yang dikelola masyarakat (Hutan Rakyat) terdapat di Kecamatan Keling, Bangsri, kembang, Mlonggo, Kedung, Tahunan, Batealit, Pecangaan, Mayong, Nalumsari dan Kalinyamatan. Namun produksi hasil hutan sejak tahun 2000-2005 mengalami penurunan yang cukup drastis.

Beberapa arahan pengembangan dari sektor kehutanan yaitu:

- 1) Memanfaatkan lahan-lahan kawasan hutan produksi sebagai kawasan lindung tentunya dengan sistem pengambilan hasil hutan yang tetap menjaga ekosistem dan ekologi wilayah serta tidak merusak lingkungan yang ada.
- 2) Program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.
- 3) Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan)

- 4) Program kecil menanam dewasa memanen
- 5) Peningkatan program penghijauan lingkungan
- 6) Peningkatan program penanganan Ilegal *Logging*
- 7) Pengembangan revitalisasi sektor kehutanan

5. Perekonomian, Industri, dan Perdagangan

a. Perekonomian

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2019, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 1,4 juta rupiah dengan kontribusi dari Kategori J (Informasi dan Komunikasi) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan 10,35%.

Tabel 4. 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah (juta rupiah) Tahun 2019

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,36	1,45	1,99	1,88	3,82
2	Pertambangan dan Penggalan	4,33	4,89	3,03	1,88	-0,21
3	Industry Pengolahan	4,64	5,22	6,04	5,6	-1,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,76	7,41	6,29	9,99	2,62
5	Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah,dan Daur Ulang	2,17	6,89	4,15	4,42	6,71
6	Kontruksi	6,88	7,45	5,99	7,66	-1,4
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,09	5,93	5,63	5,95	-4,87

8	Transportasi dan Pergudangan	6,62	6,13	6,93	8,57	-29,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,47	6,86	8,46	10,56	-6,98
10	Informasi dan Komunikasi	8,36	13,47	14,03	11,62	25,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,19	5,45	4,19	3,41	2,94
12	<i>Real Estate</i>	6,86	5,85	5,29	6,96	-0,28
13	Jasa Perusahaan	10,74	9,25	8,93	12,38	-6,56
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	1,87	2,82	2,82	-2,36
15	Jasa Pendidikan	7,69	5,34	8,06	7,64	-1,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,89	8,54	8,68	7	0,67
17	Jasa Lainnya	8,66	7,15	8,29	9,13	-1,94
Produk Domestik Regional Bruto		5,06	5,39	5,85	6,02	-1,94

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

b. Industri

Produksi unggulan dari sektor industri berupa industri menengah dan industri rumah tangga. Sedangkan potensi di sektor industri antara lain:

1) Industri Meubel

Yang mempunyai nilai ekonomis tinggi bagi Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bahkan Nasional serta memiliki pangsa pasar yang tersebar di beberapa dunia. Lokasi industri meubel hampir menyebar di semua kecamatan.

2) Industri Tenun Ikat Trosro

Yang dapat dijumpai dalam bentuk kain tenun, pakaian jadi, sarung, taplak meja, sarung bantal kursi, tirai, sprei dengan sentra produksi di Desa Troso Kecamatan Pecangaan.

3) Industri Kerajinan Monel

Terkonsentrasi di Kecamatan Pecangaan dan Kalinyamatan, salah satu produk yang membanggakan dari kerajinan monel adalah gelang yang digunakan untuk identitas Jamaah Haji asal Indonesia.

4) Industri Kerajinan Rotan

Kerajinan rotan Jepara memiliki kualitas dan daya tarik yang baik di pasar lokal, regional maupun internasional. Konsentrasi industri berada di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan.

5) Industri Konveksi

Hasil produksi dari industri konveksi sebagian besar adalah pakaian anak-anak dan dewasa dengan variasi bordir namun pemasaran masih bersifat lokal dan regional. Sentra industri konveksi ini berada di Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Nalumsari, Mayong dan Bangsri.

6) Industri Gerabah/Keramik

Hasil produksi keramik Kabupaten Jepara bermotif tradisional, kontemporer dan atik dengan jenis dan ukuran yang beragam. Sentra industri gerabah/keramik ini berada di Kecamatan Mayong.

7) Industri Rokok Kretek

Industri rokok kretek mulai mengalami peningkatan dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sentra industri rokok kretek terkonsentrasi di Desa Robayan, Kriyan dan Purwogondo (Kecamatan Kalinyamatan) serta Desa Bakalan, Welahan, Teluk Wetan dan Brantaksekarjati (Kecamatan Welahan).

8) Industri Makanan

Sentra pembuatan roti terdapat di Desa Bugo Kecamatan Welahan, sentra pembuatan kacang di Kecamatan Jepara dan Pecangaan

9) Industri Relief

Para pengrajin dalam industri ini mempunyai spesialisasi yang tidak dimiliki oleh pemahat di kota lain (keahlian turun temurun) bahkan di wilayah Jepara lainnya yaitu motif yang lebih rapat dan tipis, lebih detail pada tiap desain dan lebih bervariasi. Hal ini yang menjadikan harga jual kerajinan relief Jepara memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sentra pengrajin berlokasi di Desa Senenan Kecamatan Tahunan.

10) Industri Patung/Ukir Kayu

Industri ini telah memenuhi permintaan ke 41 negara tujuan ekspor. Ukir-ukir kayu Jepara terkenal lebih halus dan detail sehingga terkenal sampai ke daerah lain. Sentra industri terletak di Desa Mulyoharjo dan Bandengan (Kecamatan Jepara), Desa Kawak dan Desa Lebak (Kecamatan Pakis Aji) serta Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa.

11) Industri Genteng

Sentra industri genteng terletak di Kecamatan Mayong (Desa Mayong Lor, Mayong Kidul, Tunggul Pandeyan dan Tiga Juru), Kecamatan Nalumsari (Desa Pelemkerep, Jatisari dan Blimbing Rejo) serta Kecamatan Donorojo (Desa Clering dan Banyu Manis).

Beberapa arahan pengembangan dari sektor industri pengolahan antara lain :

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana terpadu pada kawasan yang akan diproyeksikan sebagai kawasan industri guna menarik investasi terutama investasi besar/luar negeri.
- b) Melakukan promosi keluar daerah / ke luar negeri guna menarik investasi yang besar dengan menerangkan tentang kondisi wilayah yang stabil dan aman, tenaga kerja yang terampil, penuh dengan sumber daya alam serta pangsa pasar dalam dan luar daerah Kabupaten Jepara yang sangat besar.

- c) Mempermudah akses kredit, bagi permodalan industri kecil/menengah melalui lembaga keuangan yang ditunjukkan pemerintah
- d) Membangun kemitraan antara pemilik industri besar dengan pemilik industri kecil yang bersifat saling menguntungkan
- e) Pemberian bantuan berupa metode manajemen industri bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang industri. Hal ini untuk menciptakan sistem industri yang efisien, teratur dan mudah dipantau perkembangannya.

12) Perdagangan

Selama 5 tahun terakhir, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang lebih dari 16 persen terhadap perekonomian Kabupaten Jepara dan merupakan lapangan usaha yang paling berperan dalam perekonomian setelah kategori Industri Pengolahan. Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini mencapai 4,89 triliun rupiah atau sekitar 16,21 persen. Dari nilai tersebut, sebagian besar merupakan sumbangan dari sub kategori perdagangan besar dan eceran selain mobil dan motor, sedangkan sumbangan dari subkategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi hanya sedikit.

Akibat pandemi Covid-19 selama tahun 2020, pertumbuhan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun 2019. Yaitu menurun dari 5,95 persen pada tahun 2019 menjadi -4,87 persen pada tahun 2020. Melemahnya kategori ini berjalan dengan melemahnya laju pertumbuhan di industri pengolahan.

6. Kondisi Umum Sistem Transportasi (Tataran Transportasi Lokal)

Tatralok adalah tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi jalan rel, transportasi

sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya. Provinsi Jawa Tengah yang berada di tengah pulau Jawa, memiliki aksesibilitas wilayah yang mudah dijangkau melalui:

a. Angkutan Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

b. Angkutan Laut dan Penyeberangan

Angkutan Laut merupakan sarana perhubungan yang sangat penting dan strategis. Untuk itu pembangunan pelayanan nasional terus ditingkatkan dan diperluas, termasuk penyempurnaan manajemen dan dukungan fasilitas pelabuhan.

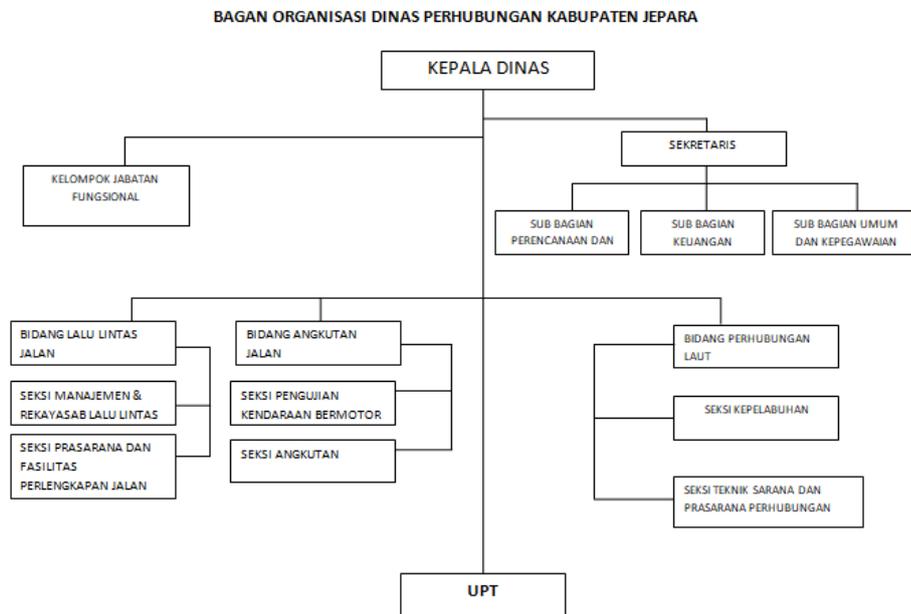
Pelabuhan adalah pintu gerbang keluar-masuknya kapal, baik yang mengangkut penumpang orang maupun barang ke suatu wilayah tujuan. Di Jawa Tengah terdapat 2 jenis pelabuhan yaitu pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan ferry, diantaranya Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan Penyeberangan Kendal, Pelabuhan Penyeberangan Karimun Jawa, dan Pelabuhan Penyeberangan Jepara.

4.2. Kondisi Pelaksanaan Angkutan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan (ASDP)

1. Instansi Pembina Bidang ASDP

Suatu instansi harus memiliki struktur organisasi karena struktur organisasi pada suatu organisasi sangat diperlukan untuk memperjelas

kedudukan kerja, tugas pokok dan fungsi pada setiap bagian kerjanya.
Berikut struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara:



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, 2021

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara

Adapun visi dan misi yang digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Visi :

“Mewujudkan Jepara Madani Yang Berkarakter, Maju Dan Berdaya Saing”

Misi:

- a. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Religius dan Berbudaya
- b. Pendayagunaan Sumber Daya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat
- c. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri
- d. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan
- e. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Perhubungan

Tugas Pokok Kepala Dinas Perhubungan yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Fungsi Kepala Dinas Perhubungan adalah:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Dinas Perhubungan

Tugas Pokok Sekretariat Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Fungsi Sekretariat Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,

kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;

- 4) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- 1) Perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja;
- 2) Penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Anggaran serta laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
- 3) Pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan- laporan insendital;
- 4) Pelaksanaan pengumpulan, penelitian analisa, penyajian, daa dan menyiapkan baahn kinerja dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- 5) Penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;

- 6) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan, dan program kegiatan, penelitiann dan membuat laporan kegiatan dinas;
- 7) Pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- 8) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- 10) Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- 11) Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- 12) Penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keungan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dinas.

Sub Bagian Keungan mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan keuangan;
- 2) Penyusunan anggaran belanja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan verifikasi rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- 4) Penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;

- 6) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi;
- 7) Pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 8) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 9) Pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- 10) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tugas sesuai lingkup tugasnya;
- 11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- 12) Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- 13) Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub Bagian umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kersipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- 2) Penyusunan data dan administrasi inventaris kantor;
- 3) Pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum surat-menyurat kersipan dan administrasi kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- 5) Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi kantor;
- 7) Pengurusan mutasi, Diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;

- 8) Pelaksanaan tugas Pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- 10) Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- 11) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 12) Pemberian saran pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- 13) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tugas sesuai lingkup tugasnya;
- 14) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- 15) Pelaksanaan pembinaan penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- 16) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Lalu Lintas Jalan

Tugas pokok Bidang Lalu Lintas Jalan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program, pedoman serta kebijakan teknis dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan.
- 2) Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan yaitu sebagai berikut :

- 1) Perencanaan manajemen lalu lintas jalan;
- 2) Penyusunan rencana kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas jalan kabupaten;
- 3) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas jalan kabupaten;
- 4) Pelaksanaan pelayanan jalan sesuai dengan tingkatannya;

- 5) Penilaian, persetujuan dan pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten;
- 6) Rekayasa lalu lintas jalan (pengadaan, pengemasan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten);
- 7) Teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
- 8) Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten;
- 9) Laik fungsi jalan , keselamatan sarana dan prasarana;
- 10) Fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
- 11) Keselamatan perusahaan angkutan umum;
- 12) Fasilitas kelaikan kendaraan;
- 13) Penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil daerah (ppnsd) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 14) Koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
- 15) Bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
- 16) Penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- 17) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri dari :

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas:

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penetapan jaringan transportasi jalan daerah, melakukan pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas/ angkutan, penetapan larangan penggunaan Jalan Kabupaten dan perizinan penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas serta analisis dampak lalu lintas padat pada jalan kabupaten.

Fungsi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- 2) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di jalan kabupaten;

- 3) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten;
 - 4) Penetapan tingkat pelayanan Jalan Kabupaten;
 - 5) Penilaian, persetujuan dan pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten;
 - 6) Audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 7) Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 8) Penyelenggaraan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan;
 - 9) Penegakan hukum oleh ppns di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 10) Koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
 - 11) Bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
 - 12) Penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
 - 13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang lalu lintas jalan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Seksi Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan Penyediaan Prasarana dan Fasilitas perlengkapan Jalan, Laik fungsi jalan, keselamatan sarana dan prasarana serta penetapan kelas jalan.

Fungsi Seksi Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengadaan pemasangan perbaikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perlengkapan rambu-rambu lalu lintas;
- 2) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penerangan jalan dan penerangan Taman;
- 3) Teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;

- 4) Laik fungsi jalan, keselamatan sarana dan prasarana serta penetapan kelas Jalan;
- 5) Koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
- 6) Bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
- 7) Penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang lalu lintas jalan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Angkutan Jalan

Tugas pokok Bidang Angkutan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bidang angkutan jalan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program, pedoman serta kebijakan teknis di bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Angkutan Jalan serta pengawasan tarif angkutan umum.
- 2) Bidang Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Fungsi bidang angkutan Jalan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusunan pedoman / juklak di bidang angkutan jalan;
- 2) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 4) Fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor keluar wilayah kabupaten;
- 5) Teknologi informasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 6) Penetapan rencana umum jaringan trayek dalam kabupaten;
- 7) Perizinan angkutan orang dalam trayek dalam kabupaten;
- 8) Penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek;
- 9) Fasilitas perizinan angkutan orang dengan trayek angkutan antar kota antar provinsi (akap);
- 10) Penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam daerah kabupaten;
- 11) Teknologi informasi angkutan jalan;

- 12) Fasilitas perizinan angkutan orang tidak dalam trayek alinnya;
- 13) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten/kota;
- 14) Koordiansi dan kerjasama kegiatan administrasi di bidangnya;
- 15) Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala dians perhubungan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan Jalan membawahi:

a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan dan penetapan kelayakan standar uji kendaraan bermotor baik angkutamn orang maupun barang dan perizinan usaha bengkel.

Fungsi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 3) Fasilitasi pengujian berkala kendaraan bermotor keluar wilayah kabupaten;
- 4) Penerapan teknologi informasi dalam pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 5) Koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
- 6) Bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
- 7) Pemberian rekomendasi izin pendirian perusahaan bengkel umum;
- 8) Penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang akuntansi tugas dan fungsinya.

b. Seksi Angkutan

Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan angkutan orang dan atau barang serta penetapan tarif angkutan.

Fungsi Seksi Angkutan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan rencana umum jaringan trayek dalam kabupaten ;
- 2) Perizinan angkutan orang dalam trayek dalam kabupaten;
- 3) Penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek;
- 4) Fasilitasi perizinan angkutan orang dengan trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP);
- 5) Penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasi dalam daerah kabupaten;
- 6) Penerapan teknologi informasi angkutan jalan fasilitasi perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya;
- 7) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam daerah kabupaten/ kota;
- 8) Koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
- 9) Bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
- 10) Penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang angkutan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perhubungan Laut

Tugas pokok Bidang Angkutan Laut yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana dan melaksanakan program pedoman serta kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhan dan penunjang keselamatan pelayaran.
- 2) Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Fungsi Bidang Perhubungan Laut yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut di wilayah daerah;
- 2) Pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan lokal penyeberangan dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS)/ Pelabuhan khusus lokal;
- 3) Pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran;
- 4) Pemantauan standar teknis sarana dan atau angkutan laut;
- 5) Rekomendasi dan/ atau perizinan dibidangnya;
- 6) Pengelolaan Pelabuhan lokal /penyeberangan;
- 7) Bimbingan dan sosialisasi penyuluhan penyuluhan teknis di bidangnya;
- 8) Koordinasi dan kerjasama kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- 9) Penyelenggaraan dan pelayanan administrasi di bidangnya;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Laut terdiri dari:

a. Seksi Kepelabuhan

Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas Merencanakan menetapkan dan atau melaksanakan pelayanan jasa pada Terminal penyeberangan Pelabuhan pengumpan lokal dan atau terminal untuk kepentingan sendiri pengawasan pengangkutan barang / bahan berbahaya, mengatur alur lalu lintas dan jaringan trayek pada Pelabuhan pengumpan pengumpan lokal dan angkutan penyeberangan, serta lain-lain pembinaan di bidang operasional kepelabuhan.

Fungsi Seksi Kepelabuhan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Pelabuhan pengumpan lokal dan penyeberangan;
- 2) Penetapan tarif jasa kepelabuhanan;

- 3) Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - 4) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 - 5) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - 6) Penetapan rencana induk dan DLKR/ DLKP Pelabuhan pengumpan lokal;
 - 7) Pemantauan dan pengamanan daerah lingkungan kerja DLKR /daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan pengumpan lokal dan Terminal penyeberangan;
 - 8) Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal dan atau terminal penyeberangan;
 - 9) Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan pengumpan lokal dan Terminal penyeberangan;
 - 10) Pengawasan pengangkutan barang atau bahan berbahaya di terminal penyeberangan;
 - 11) Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi;
 - 12) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidangnya;
 - 13) Penyelenggaraan kegiatan administrasi seksi kepelabuhan;
 - 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perhubungan laut sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan operasional standart teknis sarana dan prasarana perhubungan laut, serta merencanakan, menetapkan, memasang, memelihara dan memantau rambu- rambu lalu lintas laut.

Fungsi Seksi Teknik Sarana dan Prasarana yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemantauan pelaksanaan standar teknis sarana dan prasarana Perhubungan laut;
- 2) Pemberian rekomendasi dan perizinan di bidangnya pengukuran kapal dibawah 20 m³;
- 3) Penerbitan pas tahunan kapal dan atau pas kecil kapal isi kotor kurang dari 20 m³;
- 4) Pembangunan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);
- 5) Pengaturan fasilitas kenavigasian dan prasarana pemanduan kapal;
- 6) Perencanaan, penyediaan, pemasangan dan pengoperasian pengoperasional rambu-rambu lalu lintas laut;
- 7) Perizinan usaha/ operasi angkutan penyeberangan;
- 8) Pemberian bantuan SAR untuk musibah di laut;
- 9) Bimbingan teknis di bidangnya;
- 10) Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidangnya;
- 11) Penyelenggaraan kegiatan administrasi seksi teknik sarana dan prasarana;
- 12) Melaksanakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perhubungan laut sesuai tugas dan fungsinya.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Perhubungan dibidang masing-masing, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

4.3. Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, terutama dalam kegiatan pelayanan terhadap pengguna jasa. Angkutan penyeberangan merupakan angkutan

yang digunakan oleh masyarakat Jepara yang akan menuju ke Pulau Karimunjawa atau sebaliknya. Kondisi geografis Jepara dan Karimunjawa terpisah oleh laut, sehingga untuk melakukan perjalanan hanya dapat menggunakan moda angkutan penyeberangan karena hanya dengan menggunakan moda angkutan ini untuk bisa mencapai tujuan. Pada Laporan kelompok ini akan membahas sarana angkutan penyeberangan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Jepara berupa kapal sebanyak 3 kapal yaitu KMP. Siginjai dan KMC. Express Bahari 3F milik swasta dan satu kapal yang dimiliki Dinas Perhubungan yaitu Kapal Banawa Nusantara 98 yang melayani trayek Pulau Karimunjawa-Pulau Parang-Pulau Nyamuk. Berikut ini adalah data karakteristik KMP. Siginjai, KMC. Ekspres Bahari 3F dan Kapal Banawa Nusantara 98:



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta (2021)

Gambar 4. 4 KMP. Siginjai

Berikut ini merupakan *Ship Particular* KMP. Siginjai yang mencakup spesifikasi kapal yang ada pada Lintasan Jepara – Karimunjawa.

Tabel 4. 6 *Ship Particular* KMP. Siginjai

KARAKTERISTIK KMP. SIGINJAI		
DATA DECK:		
1	Nama Kapal	KMP. SIGINJAI

2	Nama Panggilan Kapal/Register	PODM/Jakarta
3	G.R.T	616 GRT
4	N.T	185 GRT
5	D.W.T	155 T
6	Panjang seluruhnya	45,50 M
7	Panjang garis tegak	40,920 M
8	Panjang garis muat/air	40,150 M
9	Lebar terbesar	12,00 M
10	Lebar dalam	8,20 M
11	Tinggi	3,20 M
12	Sarat air/Draft	2,14 M
13	Tahun pembangunan	TH. 2010
14	Dibuat oleh	PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard 2010
15	Bendera	Indonesia
16	Jenis kapal	Ro-Ro
17	Area service	Jepara-Karimunjawa
DATA MESIN INDUK		
1	Jumlah	2 buah
2	Merk	Yanmar
3	Type	6 AYM-WET
4	HP	830 X 2 kr/kn
5	Jumlah Cylinder	6 X 2 kr/kn
6	Rpm Max	1900 kr/kn
7	Dibuat tahun	2009 PT. YANMAR DIESEL

8	Nomor mesin	a. 1827 (Sb)
		b. 1826 (Ps)
DATA MESIN BANTU		
1	Jumlah	2 buah
2	Merk	Dongfeng Cummings
3	Type	BT 5,9 GM.3
4	Daya	64 Kw/87 HP
5	Dibuat tahun	2009 PT. Altrak 1978

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara (2021)



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta (2021)

Gambar 4. 5 KMC. Express Bahari 3F

Berikut ini merupakan *Ship Particular* KMC. Express Bahari 3F yang mencakup spesifikasi kapal yang ada:

Tabel 4. 7 *Ship Particular* Express Bahari 3F Pada Lintasan Jepara-Karimunjawa

KARAKTERISTIK KM. EXPRESS BAHARI 3F

1	Tempat Pembuatan	Malaysia
2	Tahun	2004
3	Pemilik	Pt. Pelayaran Sakti Inti Makmur Palembang
4	Lintas Penyeberangan	Jebara – Karimun Jawa (PP)
5	Type Kapal	Passanger Ship / Kapal Penumpang
6	GRT	188 T
7	Panjang seluruhnya (LOA)	40,25 meter
8	Panjang (LBP)	38,64meter
9	Lebar (B)	6,95 meter
10	Sarat Air (d)	2,85 meter
11	Merk mesin induk	CATERPILAR
12	Tenaga Kuda (PK)	925 HP
13	Jumlah Mesin	2 unit
14	Kecepatan Maximum	17 knot
15	Jenis Bahan Bakar	HSD/Solar
16	Merk mesin bantu/ HP	CATERPILAR
17	Jumlah Mesin bantu	2
18	Tenaga Kuda (PK)	82 HP
19	Jumlah Penumpang	400 Orang
20	Jumlah ABK	8 Orang

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jebara (2020)



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta, 2021

Gambar 4. 6 KM. Banawa Nusantara 98

Berikut ini merupakan *Ship Particular* Kapal Banawa Nusantara 98 yang mencakup spesifikasi kapal yang ada :

Tabel 4. 8 *Ship Particular* Kapal Banawa Nusantara 98

Pada Lintasan Pulau Karimunjawa-Pulau Parang-Pulau Nyamuk

Nama Kapal	Banawa Nusantara 98
Tipe Kapal	Penumpang
Bendera	Indonesia
Kapasitas Penumpang	24 orang
Merk motor	Izusu Marine Diesel Engine
Jenis Bahan Bakar	Solar
Panjang Keseluruhan Kapal	17,65 Meter
Lebar Kapal	4,13 Meter
Draf Kapal	1,02 Meter
Diameter	1, 85 Meter
Daya	154
Nomer Seri	379322
Tonase Kotor	34 GT
Bahan Utama Lambung Kapal	Kayu
Tempat Pembuatan	Kabupaten Rembang
Tanggal Pembangunan	5 Juni 2018
Nama Pemilik Kapal	Direktoral Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan RI

Sumber : Kantor Pelabuhan Karimunjawa

Gambar 4.7 Peta Lintasan Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk

2. Pelabuhan

Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan penyeberangan di wilayah Kecamatan Karimunjawa merupakan pelabuhan umum. Untuk menunjang kegiatan angkutan penyeberangan di Pelabuhan Karimunjawa diperlukan prasarana yang baik. Pada Pelabuhan Karimunjawa tersedia beberapa fasilitas untuk menjalankan kegiatan operasional pelabuhan seperti pelayanan terhadap penumpang dan kendaraan. Fasilitas di pelabuhan dibagi menjadi dua yaitu fasilitas daratan dan fasilitas perairan. Adapun fasilitas di Pelabuhan adalah sebagai berikut:

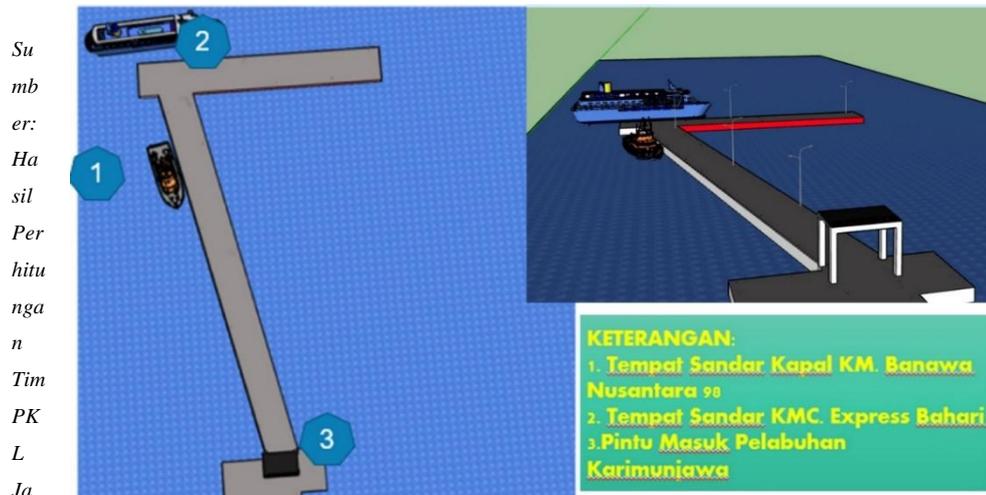
Berikut merupakan fasilitas sisi daratan yang terdapat di Pelabuhan Wilayah Karimunjawa :

Sumber: Hasil Analisa Tim PKL Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta (2021)

Gambar 4.8 Layout Pelabuhan Karimunjawa

Tabel 4.9 Fasilitas Sisi Daratan

NO	FASILITAS	INVENTARIS		LUAS (M ²)
		PANJANG	LEBAR	
1	Kantor Administrasi	15	12	180
2	Lapangan Parkir Siap Muat	10	7	70



wa Tengah - D.I.Yogyakarta (2021)

a. Kantor Administrasi

Sebuah pelabuhan penyeberangan membutuhkan manajemen yang baik. Untuk menunjang hal tersebut membutuhkan sebuah bangunan sebagai pusat kendali operasional yaitu kantor administrasi yang dipergunakan untuk aktivitas penyeberangan dalam rangka menciptakan pelayanan yang optimal terhadap pelayanan pengguna jasa. Pelabuhan Penyeberangan karimunjawa merupakan pelabuhan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, sehingga semua proses administrasi mengenai pelabuhan penyeberangan karimunjawa dilaksanakan oleh Seksi Bidang Hubungan Laut di kantor area Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa memiliki luas 180 m².



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta (2021)

Gambar 4. 9 Kantor Administrasi

b. Lapangan Parkir Siap Muat

Lapangan parkir siap muat berfungsi untuk tempat parkir kendaraan dalam kegiatan bongkar muat barang. Lapangan parkir siap muat yang tersedia di Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa adalah sebagai tempat parkir kendaraan pengantar dan penjemput serta kendaraan roda dua. secara keseluruhan luas lapangan parkir siap muat Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa sebesar 70 m². Berikut ini adalah gambar lapangan parkir siap muat yang terdapat di Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa:



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta, 2021

Gambar 4. 10 Area Parkir Siap Muat

c. Fasilitas Perairan

Berikut merupakan fasilitas sisi perairan yang terdapat di Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa :

Tabel 4.10 Fasilitas Perairan di Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa

No	Fasilitas	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dermaga	45,30	5		1
3	SBNP	-	-	-	4
4	<i>Bolder</i>	-	-	-	16
5	<i>Fender</i>	-	-	-	24

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara (2021)

1) Dermaga

Dalam operasional kapal, fungsi dermaga sangat diperlukan untuk kapal melakukan embarkasi dan debarkasi penumpang. Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa merupakan pelabuhan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, sehingga dermaga yang digunakan untuk kegiatan operasional penyeberangan merupakan dermaga plengsengan. Adapun Dermaga yang digunakan untuk sandar kapal cepat adalah Dermaga Ponton.



Sumber :Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta (2021)

Gambar 4. 11 Dermaga KM. Banawa Nusantara 98



Sumber :Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta, 2021

Gambar 4. 12 Dermaga KMC. Express Bahari

2) SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)

Merupakan Rambu dan Navigasi Pelayaran yang terdapat di kolam Pelabuhan yang berguna memberi petunjuk pada kapal yang akan sandar maupun berangkat.



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah – D.I.Yogyakarta 2021

Gambar 4. 13 Rambu Navigasi Kolam Pelabuhan Karimunjawa

3) Bolder

Bolder adalah alat penambat yang ditanam di bagian tepi dermaga yang berfungsi untuk menambat kapal- kapal yang

berlabuh, supaya tidak terjadi suatu pergeseran atau guncangan besar.



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah – D.I.Yogyakarta 2021

Gambar 4. 14 Bolder di Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa

4) Fender

Fender adalah bagian konstruksi yang berfungsi sebagai penahan benturan ketika kapal bertambat. Kontruksi ini dapat dibuat bergandengan dengan dermaga atau pun terpisah, dan setiap fender ini menerima gaya horizontal dari benturan kapal, di pelabuhan penyeberangan karimunjawa, fender berjumlah sebanyak 24 unit di dermaga Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa.



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah – D.I.Yogyakarta 2021

Gambar 4. 15 Fender di Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa

B. Dermaga Pulau Parang

Dalam operasional kapal, fungsi dermaga sangat diperlukan untuk kapal melakukan embarkasi dan debarkasi penumpang. Dermaga pulau parang merupakan dermaga umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, sehingga dermaga yang digunakan untuk kegiatan operasional penyeberangan merupakan dermaga plengsengan.

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah – D.I.Yogyakarta 2021

Gambar 4. 16 Dermaga Pulau Parang

C. Dermaga Pulau Nyamuk

Dalam operasional kapal, fungsi dermaga sangat diperlukan untuk kapal melakukan embarkasi dan debarkasi penumpang. Dermaga



pulau

nyamuk merupakan dermaga umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, sehingga dermaga yang digunakan

untuk kegiatan operasional penyeberangan merupakan dermaga plengsengan



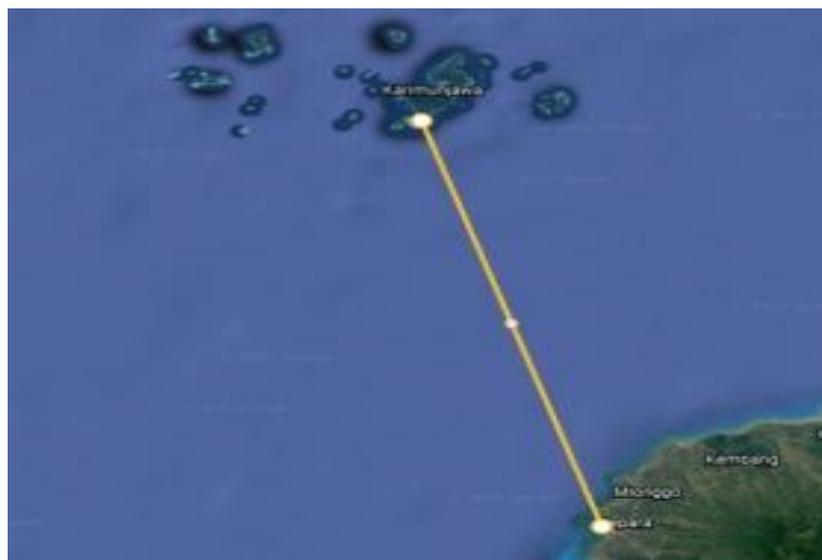
Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah – D.I.Yogyakarta 2021

Gambar 4. 17 Dermaga Pulau Nyamuk

5. Jaringan

a. Lintasan Penyeberangan

Jaringan angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa Provinsi Jawa Tengah merupakan angkutan yang alur pelayarannya menggunakan jalur laut sebagai prasarana dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Kebutuhan pelayanan angkutan penyeberangan dilayani melalui dermaga kapal penyeberangan dan dermaga kapal cepat. Berikut merupakan peta jaringan trayek dari Jepara dan Karimunjawa



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta, (2021)

Gambar 4.18 Trayek di Pelabuhan Penyeberangan Jepara



Sumber : Kantor Pelabuhan Karimunjawa

Gambar 4.19 Peta Lintasan Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk

Pelabuhan Penyeberangan yang diawasi oleh BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yaitu Pelabuhan Penyeberangan Jepara, Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa dan Pelabuhan Penyeberangan Kendal. Pelabuhan Jepara memiliki 1 lintasan yaitu Jepara – Karimunjawa dengan jarak 41 mil \pm 4-5 jam kemudian pelabuhan Kendal memiliki 1 lintasan yaitu Kendal Kumai dengan jarak 280 mil \pm 24 jam dan pelabuhan karimunjawa dengan jarak 31,39 mil \pm 4 jam memiliki 3 lintasan yaitu Karimunjawa – Pulau Parang, Karimunjawa – Pulau Nyamuk, Dan Pulau Parang – Pulau Nyamuk.

Khusus untuk pelabuhan penyeberangan Jepara berada di Kabupaten Jepara dan di bawah wilayah kerja Unit Penyelenggara Teknis Pelabuhan Penyeberangan Jepara.

Tabel 4. 11 Daftar Nama Pelabuhan Yang Dilayani BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan D.I.Yogyakarta

No	Nama Pelabuhan	Lintasan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh
1	Jepara	Jepara – Karimunjawa	41 mil	± 4 - 5 Jam
2	Karimunjawa	Karimunjawa –Jepara	41 mil	± 4 - 5 Jam
		Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk	31,39 mil	± 4jam
3	Kendal	Kendal – Kumai	280 mil	± 24 Jam

Sumber : BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, 2021

6. Pembinaan Angkutan

a. Perizinan

Sesuai pada undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 28 disebutkan bahwa penetapan izin usaha diberikan oleh :

- 1) Bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;

- 2) Gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau
- 3) Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.

Pelabuhan Penyeberangan yang terdapat di Jepara yaitu Pelabuhan Penyeberangan Jepara termasuk angkutan penyeberangan dalam provinsi, sehingga yang menetapkan izin usaha yaitu Gubernur kepada badan usaha untuk melayani angkutan penyeberangan lintas Jepara – Karimunjawa ataupun sebaliknya.

b. Tarif

Tarif yang berlaku di lintasan angkutan penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Jepara, berdasarkan Peraturan Bupati Jepara No 25 Tahun 2019.

Tabel 4. 12 Tarif Kapal Penyeberangan Lintasan Jepara - Karimunjawa

No	Jenis Tiket	Tarif
A	Penumpang	
1	Ekonomi Dewasa	Rp92.500
2	Ekonomi Anak	Rp52.000
B	Kendaraan	
1	Golongan I	Rp33.750
2	Golongan II	Rp81.000
3	Golongan III	Rp. 282.000
4	Golongan IV	Rp819.000
5	Golongan V	Rp1.071.000

6	Golongan VI	Rp1.890.000
7	Golongan VII	Rp2.394.000
8	Golongan VIII	Rp3.150.000

Sumber : BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, 2021

Tabel 4. 13 Tarif Angkutan KMC. Express Bahari lintas Jepara – Karimunjawa

No	Kelas Tiket	Harga Tiket
1	Executive – Oneway	Rp. 164.000
2	VIP - Oneway	Rp. 194.000
3	Warga Lokal Karimunjawa	Rp. 104.000
4	Guru Karimunjawa	Rp. 104.000
5	Executive – PP	Rp. 328.000
6	VIP – PP	Rp. 388.000
7	Infant (Baby 0-3 Years Old)	Rp. 20.000

Sumber: PT.Express Bahari, 2021

Tabel 4. 14 Tarif Penumpang KM. Banawa Nusantara 98

Rute	Dewasa	Anak – anak (Dibawah 10 tahun)
Karimunjawa – Pulau Parang Pulau Parang – Karimunjawa	/ Rp.35.000	Rp.20.500
Karimunjawa – Pulau Nyamuk Pulau Nyamuk – Karimunjawa	/ Rp.53.000	Rp.32.500
Pulau Parang – Pulau Nyamuk Pulau Nyamuk – Pulau Parang	/ Rp.18.000	Rp.10.500

Sumber : Peraturan Bupati Jepara

Tabel 4. 15 Tarif Muatan KM. Banawa Nusantara 98

Rute	Barang Curah (1 TON)	Campuran Sembako (keranjang < 60 cm)	Campuran Sembako (keranjang > 60cm)	Kendaraan	Hewan
Karimunjawa – Pulau Parang / Pulau Parang – Karimunjawa	Rp.165.000	Rp.6.000	Rp.12.000	Sepeda : Rp.8.500 Motor : Rp.21.000	Sapi, Kerbau /sejenisnya : Rp.38.500 Kambing, Domba /sejenisnya : Rp.8.000
Karimunjawa – Pulau Nyamuk / Pulau Nyamuk – Karimunjawa	Rp.255.000	Rp.4.000	Rp.8.000	Sepeda : Rp.13.500 Motor : Rp.32.000	Sapi, Kerbau /sejenisnya : Rp.59.000 Kambing, Domba /sejenisnya : Rp.12.000
Pulau Parang – Pulau Nyamuk / Pulau Nyamuk – Pulau Parang	Rp.90.000	Rp.2.000	Rp.4.000	Sepeda : Rp.5.000 Motor : Rp.11.000	Sapi, Kerbau /sejenisnya : Rp.21.000 Kambing, Domba /sejenisnya : Rp.4.500

Sumber : Peraturan Bupati Jepara

c. Asuransi

Asuransi kecelakaan pada angkutan penyeberangan di bawah naungan PT. Jasa Raharja, memiliki tingkat tanggungan yang berbeda-beda berdasarkan jarak lintasan dan tarif yang berlaku pada tiap-tiap lintasan yang ada.

Penumpang dan kendaraan yang membeli tiket secara resmi dari loket yang terdapat di masing-masing pelabuhan penyeberangan terjamin oleh UU. No.33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang melalui jasa asuransi PT. Jasa Raharja.

d. Angkutan B3 (Barang Berbahaya dan Beracun)

Dalam pelayanan angkutan barang berbahaya dan beracun yang berhak untuk memberikan izin yaitu syahbandar begitu juga dengan pemuatannya diawasi oleh syahbandar.

Dalam kegiatan pemuatan barang di Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa bisa dikatakan tidak pernah memuat barang berbahaya ataupun beracun. Hal ini disebabkan yang akan menggunakan jasa angkutan penyeberangan melalui Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa didominasi masyarakat sekitar dan barang berupa hasil bumi dan kebutuhan pokok sehari-hari.